

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi pemerintah tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. E-SAKIP mengintegrasikan proses pelaporan dan evaluasi kinerja secara elektronik untuk mempermudah pemantauan dan pengelolaan kinerja instansi pemerintah (Defanio Azriel Setiawan 2024).

Terdapat persepsi umum terhadap birokrasi di Indonesia yang dinilai tidak efektif dan efisien. Birokrasi di Indonesia memiliki stigma negatif yang memberi dampak *trust issues* kepada masyarakat luas. Terdapat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), administrasi yang rumit, dan pegawai yang tidak profesional. Pada dasarnya, birokrasi bertanggung jawab untuk melayani rakyat. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi dianggap dapat mengurangi biaya untuk transparansi dan mengurangi tingkat korupsi di sektor pemerintahan (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Pemerintah harus membangun sistem pelayanan

publik yang memadai dan mengembangkan kebijaksanaan publik yang rasional dan demokratis.

Ini menunjukkan profesionalisme birokrasi yang menekankan bahwa efektivitas dan efisiensi pelayanan sangat penting untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi agar birokrasi menjadi bersih dan bermartabat. Menurut Muhammad Dawud Shoimuna (2024), menyelaraskan pelayanan publik sebagai pilar administrasi publik membutuhkan upaya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (E-SAKIP), dibangun sebagai respons terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja instansi pemerintah dalam era *digital* saat ini. Untuk memenuhi tuntutan ini, pemerintah membangun E-SAKIP, sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. E-SAKIP dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga pemerintah. E-SAKIP memungkinkan masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya, yang menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab (Bappeda, 2021). Selain itu, mereka memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan kinerja pemerintah, yang menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, E-SAKIP berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Akuntabilitas adalah unsur dalam menciptakan *Good Governance* atau tata kelola yang baik (Sulindawati, 2022). Dalam organisasi nir laba, akuntabilitas merupakan komponen penting, laporan keuangan harus disajikan untuk menilai kinerja pengelolaan dan entitas organisasi dalam hal memberikan pelayanan dan keberlanjutan (Purnamawati, 2018). Akuntabilitas dapat digambarkan sebagai tanggung jawab untuk mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan serta kualitas seorang pemimpin atau pejabat yang tidak memperhatikan kelompok tertentu (Purnamawati, 2024). Pemerintah yang menyadari betapa pentingnya akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat adalah tanda reformasi birokrasi. Melalui “Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)”, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng menjalankan akuntabilitas kinerjanya melalui E-SAKIP yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng menjalankan akuntabilitasnya melalui satu *platform* yang dipantau dan dikelola oleh bagian organisasi dalam memudahkan proses pemantauan dan pengendalian Kinerja Perangkat Daerah. Terdapat beberapa dokumen seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja yang telah diupload oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

Ketut Karmini Asti (Analisis Kebijakan Ahli Muda), Bapak I Nyoman Sarassija (Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja) dan Ni Made Sinta Laraswati (Staf Sub Kinerja dan Reformasi Birokrasi) (7 Februari 2025) menyatakan bahwa:

Kabupaten Buleleng mulai menerapkan E-SAKIP pada tahun 2017. Permasalahan yang dialami dari penerapan E-SAKIP adalah belum tersedianya fitur untuk mencetak laporan atau dokumen dalam bentuk fisik, sehingga saat ini kita hanya dapat membaca laporan tersebut melalui sistem secara *digital*. Dari segi sistem, salah satu kendala yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara data yang ada di *hardcopy* dengan data yang di *input* ke dalam sistem E-SAKIP, yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pelaporan dan analisis kinerja. Kendala dalam penginputan anggaran pada sistem E-SAKIP adalah ketidaksesuaian jadwal penginputan per triwulan terkait realisasi kinerja dan anggaran dari perangkat daerah, sehingga menghambat sinkronisasi laporan anggaran dengan realisasi kinerja.

Merujuk pada fenomena di atas, peneliti merumuskan masalah yang dikaji, yaitu bagaimana efektivitas penerapan sistem berbasis E-SAKIP dalam meningkatkan kinerja pemerintah pada Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Defano Azriel Setiawan dan Oktarizka Reviandani (2024), dengan judul penelitian Efektivitas E-SAKIP Dalam Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa, e-sakip berhasil meningkatkan akuntabilitas di DPMPTSP Kota Surabaya. Tetapi masih ada beberapa hambatan di tahap ini dari proses. Kurangnya sosialisasi pembuat kebijakan dan kekurangan sumber daya manusia untuk pelaksanaan e-sakip menjadi penyebab permasalahan ini. Oleh karena itu, terdapat rekomendasi ke setiap perangkat regional dan meningkatkan jumlah tenaga kerja berkualitas tinggi agar program dapat berjalan dengan efektif.

Penelitian terkait Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) yang dilakukan oleh Ferdeline Lunga Nani, dkk (2021) dengan judul Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan

kurang terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ketepatan waktu serta sasaran yang menjadi target dalam indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumennya. Integrasi, dari proses dan prosedur sosialisasi belum berjalan sesuai harapan yakni dari kuantitas kegiatan maupun hasil yang ingin dicapai, masih kurangnya respon perangkat daerah maupun minimnya kompetensi penyelenggara, pengembangan konsensus tanpa dilakukan evaluasi kinerja. Adaptasi penyelenggaraan sistem ini dari ketersediaan sarana prasarana pendukung cukup memadai, namun dari sisi pemanfaatan teknologi informasi belum ada serta peningkatan kemampuan sumber daya belum optimal.

Pemerintahan daerah secara teoritis adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah. yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini memiliki kekuasaan dan kebebasan untuk mengambil keputusan tentang kebijakan dan bertanggung jawab tanpa dikontrol oleh otoritas yang lebih tinggi (Nurcholis, 2005, p. 20). Pemerintah daerah yang dimaksud disini yakni adalah Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, seperti tujuan organisasi, target, atau sasaran jangka panjang. Untuk mengukur seberapa efektif E-SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, Duncan mengemukakan indikator pengukuran kriteria efektivitas dalam Streers (2012:53), yang menyatakan kriteria pengukuran efektivitas terdapat tiga komponen yaitu pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai proses. Oleh karena itu, pentahapan diperlukan untuk menjamin

pencapaian tujuan akhir, baik dalam hal pencapaian bagian-bagiannya maupun dalam hal periodisasinya. Tujuan terdiri dari beberapa faktor, seperti jangka waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan proses sosialisasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Semua pihak harus berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar proses penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya dalam melaksanakan kemampuan utama setiap lembaga pemerintahan, dapat berlangsung secara optimal, transparan, akuntabel, adil, dan responsif. Pemerintah maupun masyarakat harus menerjemahkan komitmen tersebut dalam keberpihakan pada integritas, profesionalisme, etos kerja, efisiensi, dan efektifitas, serta moral yang tinggi dari setiap penyelenggara negara. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi, sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seperti yang dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, yang menuntut bahwa lembaga pemerintah di dalamnya bertanggung jawab atas kinerja mereka. Guna mewujudkan hal tersebut, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah diubah menjadi

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perubahan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Solusi penting untuk melaksanakan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah pelatihan SAKIP. Pelatihan ini akan mengajarkan para pengguna bagaimana menyelenggarakan SAKIP, termasuk membangun rencana strategis, kontrak kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, penyusunan oleh karena itu, pelatihan SAKIP mencakup indikator kinerja, pelaporan kinerja, rewiuw LAKIP, dan evaluasi kinerja dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam pembuatan laporan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah (Radinda & Saleh, 2021; Utami, 2018). Pelatihan SAKIP juga meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peserta pelatihan dididik untuk memahami dan menguasai konsep dasar SAKIP serta menerapkan nilai-nilai *Core Value* Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, pelatihan E-SAKIP menjadi solusi penting dalam mewujudkan AKIP yang efektif dan efisien, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Organisasi menggunakan teknologi informasi untuk mencapai tujuan mereka untuk menggunakan sumber daya mereka dengan lebih efisien dan efektif (Yuniarta & Purnamawati, 2021).

Berdasarkan uraian diatas peneliti memutuskan untuk mengadakan penelitian pada instansi Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Buleleng dan memberikan judul penelitian ini dengan judul **“Efektivitas Penerapan Sistem Berbasis E-**

SAKIP Dalam Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng)”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dapat mengidentifikasi berbagai masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari segi sistem, masalah yang dihadapi dalam penerapan E-SAKIP adalah ketiadaan fitur untuk mencetak laporan atau dokumen langsung dari sistem. Hal ini menyulitkan pengguna yang membutuhkan salinan fisik laporan kinerja untuk kepentingan administrasi, verifikasi, atau dokumentasi, sehingga menghambat efisiensi kerja dan kelancaran koordinasi antar pihak terkait.
2. Dari segi penginputan, salah satu kendala yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara data yang ada di *hardcopy* dengan data yang diinput ke dalam sistem E-SAKIP, yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pelaporan dan analisis kinerja. Kendala dalam penginputan anggaran pada sistem E-SAKIP adalah ketidaksesuaian jadwal penginputan per triwulan terkait realisasi kinerja dan anggaran dari perangkat daerah, sehingga menghambat sinkronisasi laporan anggaran dengan realisasi kinerja.

1.3 Pembahasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah metode kualitatif. Selain itu, untuk membatasi masalah agar penelitian ini lebih efektif, efisien, dan terarah dan dapat dikaji lebih mendalam, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Terdapat satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas menurut Duncan yang terdapat tiga komponen yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi sebagai pedoman pengukuran efektivitas sistem E-SAKIP dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat disimpulkan pokok masalah yang akan peneliti ambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan E-SAKIP dari pencapaian tujuan dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah?
2. Bagaimana efektivitas penerapan E-SAKIP dari integrasi dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah?
3. Bagaimana efektivitas penerapan E-SAKIP dari adaptasi dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan terjawabnya rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas E-SAKIP dari pencapaian tujuan dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas E-SAKIP dari integrasi dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas E-SAKIP dari adaptasi dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai saran dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya terkait efektivitas penerapan sistem berbasis E-SAKIP dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti memperoleh ilmu pengetahuan mengenai penggunaan sistem E-SAKIP khususnya dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan selain sebagai referensi juga dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi dan Teknologi, yaitu mengenai peran dan

manfaat penerapan sistem E-SAKIP dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

